

**“PENGARUH MORALITAS, RELIGIUSITAS, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”**

SKRIPSI



Oleh:
MOH. KHAIRIL ANWAR
NIM: 18520023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**“PENGARUH MORALITAS, RELIGIUSITAS, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

**MOH. KHAIRIL ANWAR
NIM: 18520023**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
**“PENGARUH MORALITAS, RELIGIUSITAS, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”**

SKRIPSI

Oleh

MOH. KHAIRIL ANWAR

NIM : 18520023

Telah Disetujui Pada Tanggal 19 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Novi Lailiyul Wafiroh, M.A.
NIP. 199211012019032020

LEMBAR PENGESAHAN

**“PENGARUH MORALITAS, RELIGIUSITAS, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”**

SKRIPSI

Oleh

MOH. KHAIRIL ANWAR

NIM : 18520023

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 22 Desember 2023

Susunan Dewan Penguji:

Tanda
Tangan

- 1 Ketua Penguji
BAB I Nawirah, M.S.A., Ak. CA
NIP. 198601052023212031
- 2 Anggota Penguji
BAB II Kholilah, M.S.A
NIP. 198707192019032010
- 3 Sekretaris Penguji
BAB III Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP. 199211012019032020



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D NIP.
197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Moh. Khairil Anwar
NIM : 18520023
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGARUH MORALITAS, RELIGIUSITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

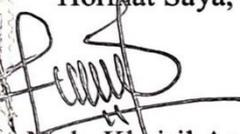
Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “Klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Desember 2023

Hormat Saya,




Moh. Khairil Anwar
NIM. 18520103

HALAMAN MOTTO

“Semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak.”

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Din al-Islam Wal Iman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., MEI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, Se., M.Bus., Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Novi Lailiyul wafiroh, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, yang terus mendoakan saya supaya diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Kakak-kakak dan seluruh saudara yang telah memberikan semangat dan bimbingan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh sahabat karib yang senantiasa mendengarkan keluh kesah dan selalu membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

9. Seluruh teman-teman Musyrif Pusat Mahad Al-Jamiah yang turut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Untuk yang terakhir, saya berterimakasih kepada diri sendiri karena mampu bertahan menjaga kesehatan mental serta psikis dalam menghadapi proses penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin.

Malang, 19 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis.....	19
2.2.1 Moralitas.....	19
2.2.2 Religiusitas	21
2.2.3 Sistem Pengendalian Internal	27
2.2.4 <i>Whistleblowing system</i>	31
2.2.5 Pencegahan <i>Fraud</i>	41
2.3 Kerangka Konseptual	45
2.4 Hipotesis Penelitian.....	45
2.4.1 Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	45
2.4.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	46

2.4.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	47
2.4.4	Pengaruh <i>Whistleblowing system</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		50
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
3.2	Lokasi Penelitian	50
3.3	Populasi dan Sampel	51
3.3.1	Populasi	51
3.3.2	Sampel.....	52
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	52
3.5	Data dan Jenis Data	53
3.6	Teknik Pengumpulan Data	53
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	54
3.8	Analisis data	56
3.3.1	Uji Instrumen Penelitian	56
3.3.2	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.3.1	Analisis Statistik Deskriptif	58
3.3.2	Uji Hipotesis	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		61
4.1	Hasil Penelitian	61
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	61
4.1.2	Uji Instrumen Penelitian.....	65
4.1.3	Uji Asumsi Klasik	69
4.1.4	Uji Hipotesis.....	72
4.2	Pembahasan.....	77
4.2.1	Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud.....	77
4.2.2	Pengaruh Religiusitas Terhadap Pencegahan Fraud	78
4.2.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud	79

4.2.4 Pengaruh <i>Whistleblowing</i> System Terhadap Pencegahan Fraud.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
5.3 Keterbatasan Penelitian	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Operasional Variabel	55
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	62
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	63
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	63
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	64
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....	65
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas.....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Religiusitas	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel <i>Whistleblowing system</i>	67
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel <i>Fraud</i>	68
Tabel 4.12 Hasil Uji Reabilitas	69
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.15 Hasil Regresi Berganda.....	73
Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial T.....	75
Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	45
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	72

ABSTRAK

Anwar, Moh. Khairil. 2023. SKRIPSI: “Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo).”

Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A.

Kata kunci : Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Pencegahan *Fraud*.

Fenomena kecurangan di dalam dunia pemerintahan sudah sangat sering terjadi dengan didukung oleh perkembangan teknologi yang dapat mempermudah tindak kecurangan tersebut terjadi. Kecurangan di dalam dunia pemerintahan memang tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimalisir dengan melakukan tindakan pencegahan *Fraud*. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai aspek, mulai dari segi moralitas, tingkat religiusitas individual, sistem pengendalian internal dan *Whistleblowing system*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moralitas, religiusitas, sistem pengendalian internal dan *Whistleblowing sytem* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan didapatkan sampel sejumlah 80 responden dari 5 kecamatan di Kabupaten Situbondo dengan metode pengambilan data melalui penyebaran kuesioner. Aplikasi olah data yang digunakan di dalam penelitian adalah SPSS 25.

Hasil dari penelitian ini adalah moralitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, religiusitas dan *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

ABSTRACT

Anwar, Moh. Khairil. 2023. THESIS. Tittle: "*The Influence of Morality, Religiosity, Internal Control Systems and Whistleblowing Systems on Fraud Prevention by Village Financial Managers (Empirical Study of Village Government in Situbondo Regency).*"

Supervisor : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A.

Keyword : *Morality, Religiosity, Internal Control System, Whistleblowing System, Fraud Prevention.*

The phenomenon of fraud in the world of government has occurred very often, supported by technological developments that can make it easier for these acts of fraud to occur. Fraud in the world of government cannot be eliminated, but it can be minimized by taking fraud prevention measures. This prevention can be carried out in various aspects, starting from the perspective of morality, individual level of religiosity, internal control system and Whistleblowing system. The aim of this research is to determine the influence of morality, religiosity, internal control systems and Whistleblowing systems on preventing fraud in village financial management.

This research approach uses a quantitative method with a purposive sampling technique and a sample of 80 respondents from 5 sub-districts in Situbondo Regency was obtained using a data collection method through distributing questionnaires. The data processing application used in the research is SPSS 25.

The results of this research are that morality and the internal control system have no effect on preventing fraud, religiosity and the Whistleblowing system have an effect on preventing fraud in village financial management.

مستخلص البحث

الأنوار، محمد خير. 2023. بحث جامعي: "تأثير الأخلاق والتدين ونظام الرقابة الداخلية ونظام الإبلاغ عن المخالفات على منع الاحتيال في الإدارة المالية للقرى (دراسة تجريبية على حكومات القرى في مقاطعة سيتوبوندو)".
المشرفة: نوفي ليلبول وافروه، الماجستير.
الكلمات الأساسية: الأخلاق، التدين، نظام الرقابة الداخلية، نظام الإبلاغ عن المخالفات، منع الاحتيال.

إن ظاهرة الاحتيال في عالم الحكومة أصبحت تحدث في كثير من الأحيان، مدعومة بالتطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهل حدوث الاحتيال. لا يمكن القضاء على الاحتيال في عالم الحكومة، ولكن يمكن التقليل منه من خلال اتخاذ تدابير لمنع الاحتيال. ويمكن أن يتم هذا المنع في جوانب مختلفة، بدءاً من الجانب الأخلاقي، ومستوى التدين الفردي، ونظام الرقابة الداخلية، ونظام الإبلاغ عن المخالفات. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير الأخلاق والتدين ونظام الرقابة الداخلية ونظام الإبلاغ عن المخالفات على منع الاحتيال في الإدارة المالية بالقرية.
يستخدم هذا النهج البحثي الأساليب الكمية مع تقنيات أخذ العينات الهادفة وحصل على عينة من 80 مستجيباً من 5 مناطق فرعية في منطقة سيتوبوندو باستخدام طرق جمع البيانات من خلال توزيع الاستبيانات. تطبيق معالجة البيانات المستخدم في البحث هو SPSS 25.
نتائج هذا البحث الجامعي هي أن الأخلاق ونظام الرقابة الداخلية ليس لهما تأثير على منع الاحتيال، والتدين ونظام الإبلاغ عن المخالفات يؤثران على منع الاحتيال في الإدارة المالية بالقرية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Merupakan sebuah agregasi koloni masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan, kebutuhan domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul tradisional yang disegani dalam struktur pemerintahan Indonesia (Peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014). Dalam menjalankan segala kegiatan manajerialnya, desa membutuhkan suatu dana dari pemerintahan pusat. Dana ini menjadi sumber pemasukan keuangan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa.

Dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Namun dengan adanya dana desa juga memicu munculnya permasalahan baru, yakni tentang pengelolaan dana desa. Tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana tersebut. Hal ini menandakan bahwa perangkat desa masih dianggap rendah kualitas SDM-nya dan belum kritisnya masyarakat terhadap pengelolaan APB Desa, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti yang dimuat pada laman berita *detik news* yakni dituntutnya Kepala Desa (Kades) Kamaruton,

kabupaten Serang, Kujaeni 6 tahun 6 bulan (6.5 tahun) penjara akibat adanya dugaan korupsi dana desa senilai Rp. 546 juta pada tanggal 11 Oktober 2022 kemarin. Kasus lain juga dipaparkan oleh *detiksulsel* yakni Mantan Kepala Desa Patengko, Kecamatan tomni Timur, kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 488 juta pada tanggal 04 Oktober 2022 kemarin.

Tidak hanya dua fenomena di atas, pada laman berita *www.detik.com* juga dipaparkan lebih dari 10 kasus korupsi dana desa dalam rentan waktu bulan mei sampai bulan oktober tahun 2022. Bahkan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar (databoks.katadata.co.id).

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa sehingga dapat mengakibatkan timbulnya *Fraud*. *Fraud* merupakan representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini serta ditindaklanjuti oleh korban (Wulandari, dkk 2017). Adanya tindak kecurangan (*Fraud*) tersebut dapat disebabkan karena adanya peluang atau kesempatan pada pelaku tindakan kecurangan. Kesempatan yang tersedia, tidak hanya dari luar bahkan dari segi individual juga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil penelitian Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral

individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Moroney (2008) menemukan bahwa semakin tinggi level moral individu akan semakin sensitive terhadap isu-isu etika. Moralitas akan dinilai ada apabila seseorang bisa mengambil sikap yang baik karena adanya kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kesadaran dalam beretika sangatlah penting bagi pengelola keuangan baik di desa maupun tempat lainnya. Puspasari (2012), secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis, oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan ialah karena rendahnya tingkat religiusitas yang dimiliki. Nilai religius akan membantu seseorang untuk bersikap sesuai etika, dimana ajaran agama telah menjelaskan bagaimana cara beretika yang baik (Satrya, dkk 2019). Religiusitas seseorang dapat berpengaruh terhadap kinerja mereka didalam perusahaan. Sikap religiusitas yang dimiliki setiap individu, akan menjadi batasan dalam menjalankan persaingan dalam dunia kerja. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin rendah kemungkinan kecurangan yang dilakukan. (Diana, dkk 2018). Menurut Ancok & Suroso (2001) religiusitas ialah keberagamaan yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Oleh karena itu, Religiusitas juga mempengaruhi kecurangan. Religiusitas juga akan mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan suatu tindakan, baik dalam organisasi maupun dalam berinteraksi sosial. Hal ini kerap dijadikan titik acuan baik buruknya

seseorang dalam berorganisasi. Apabila tingkat religiusitasnya baik maka perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut cenderung juga akan baik. Begitupun dengan sebaliknya, apabila tindakan orang tersebut kurang baik (melakukan tindakan kecurangan atau *Fraud*) maka dapat dipungkiri bahwa tingkat religiusitas orang tersebut kurang baik. Karena hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Arfiana (2019) dalam penelitiannya bahwa agama mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai religiusitas tinggi mereka tidak akan melakukan tindak kecurangan karena apa yang mereka lakukan akan bertentangan dengan ajaran agama, dan religiusitas yang tinggi dapat meningkatkan independensi seseorang. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung selalu berpegang teguh terhadap kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan atau kebenaran.

Sistem pengendalian internal juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah adanya tindakan kecurangan atau *Fraud*. Muliyanto (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Sistem pengendalian internal juga memiliki peran penting atas terjadinya tindakan kecurangan. Karena sistem inilah yang merencanakan, melaksanakan serta memantau seluruh aktivitas dalam berorganisasi.

Pengendalian intern atau pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian dimana dapat diperoleh dari suatu struktur yang terkordinasi yang

berguna bagi pimpinan untuk menyusun laporan keuangannya lebih berhati-hati, mencegah kecurangan dalam organisasi, dan mengamankan harta organisasi Soleman, Rusman (2013). Sistem pengendalian internal adalah sistem yang digunakan untuk mencatat aset bisnis, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan memastikan integritas dan efisiensi bisnis (Yuhanis Ladewi, 2017: 39). IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) wilayah jawa timur juga menjelaskan dalam artikelnya yakni SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa di terapkan dalam pengelolaan keuangan desa, SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peranan penting atas terjadi atau tidaknya suatu tindakan kecurangan atau *Fraud* terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Para pengelola keuangan desa harus bertanggungjawab dalam melakukan tata usaha. Mulai dari menyusun RAK desa, menerima, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Untuk mencapai titik efektivitas tugas pengelola keuangan tentunya membutuhkan sifat individual yang kompeten, mulai dari segi moral, segi religiusitasnya bahkan sistem pengendalian internalnya juga perlu diperhatikan. Karena hal tersebutlah nanti yang akan menentukan baik buruknya tindakan yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa.

Whistleblowing system juga merupakan sebuah *system* yang bisa meminimalisir terjadinya *Fraud*. Vredy (2015) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sistem pelaporan pelanggaran atau yang biasa disebut dengan *Whistleblowing system* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk melaporkan adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal dalam organisasi. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap kecurangan yang dapat merugikan organisasi dan mencegah terjadinya kecurangan lebih lanjut. Adanya tindakan pelaporan dari *Whistleblower* bukanlah bentuk atas tidak solidaritasnya terhadap sesama karyawan. Namun hal ini justru menjadi titik keberanian dan pengambilan sikap jujur yang harus ada pada setiap karyawan dalam sebuah organisasi. Peran *whistleblower* sangat penting dalam mengungkap suatu perbuatan melawan hukum, terutama dari sudut pandang internal organisasi. Melawan hukum bukan berarti melanggar aturan yang ada, namun justru sebaliknya yakni mengungkap kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang bersifat curang dengan bukti-bukti yang dimilikinya. *Whistleblower* dalam sebuah organisasi juga dapat mempermudah upaya pencegahan terjadinya *Fraud* (Rosalina, 2021).

Penerapan *Whistleblowing system* di dalam sebuah organisasi atau lembaga, pengawasan kinerja secara internal dapat berjalan dengan lancar. Namun pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh atasan atau audit internal saja, akan tetapi sesama pegawai juga secara tidak langsung akan saling mengawasi. Selain memantau kualitas kinerja, pegawai juga dapat melaporkan tindakan penyalahgunaan yang dilakukan sesama pegawai, melalui sistem *Whistleblowing*

yang terhubung langsung dengan atasannya atau komite audit akan menerima, mengkaji dan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Meskipun hanya bertugas sebagai pelapor, tidak banyak orang yang berani mengambil tindakan tersebut. Karena tentu menimbulkan banyak konsekuensi yang akan dialami *Whistleblower*. Namun dalam hal ini tentu sebuah organisasi yang menerapkan *Whistleblowing system* akan memberikan sebuah jaminan keamanan, perlindungan bahkan reward terhadap *Whistleblower*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelapor tidak akan mengalami kerugian apapun (Katarina, 2021).

Pencegahan *Fraud* yang semakin baik dilakukan, maka akan semakin baik (bersih) juga lingkungan organisasinya. Begitupun sebaliknya, jika upaya pencegahan *Fraud* sangat rendah, maka kesempatan atau peluang terjadinya *Fraud* akan semakin meningkat. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya beberapa fenomena yang terjadi, yakni tindakan kecurangan berupa korupsi dana desa di kabupaten situbondo. Pada bulan juni 2019, diberitakan bahwa Setiap tahun selalu ada Kepala Desa di Situbondo masuk penjara, karena terjerat kasus korupsi Dana Desa (DD). Berdasarkan temuan BPK, tahun ini (2019) ada sembilan desa harus mengembalikan keuangan, karena penggunaan dana desa tak bisa dipertanggung jawabkan. Bahkan, dua kasus dugaan penggelapan uang Dana Desa (DD) diantaranya sudah masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Yakni dugaan penggelapan Dana Desa (DD) di Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, dan Dana Desa (DD) di Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo. Fenomena tersebut mengakibatkan timbulnya pernyataan bahwa setiap tahun selalu

ada tindakan *Fraud* berupa korupsi dana desa di kabupaten situbondo (FaktualNews.co, 2019).

Tanpa menunggu setahun, di bulan juli pada tahun yang sama (2019) terdapat tiga kepala desa ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi. Hal ini masih bersumber pada FaktualNews.co yang memberitakan bahwa “Akibat perbuatan tiga kades itu mengakibatkan kerugian negara Rp1 miliar lebih. Selain itu, kami telah melakukan penyidikan terhadap tiga kades tersebut,” ujar Nur Slamet, Selasa (23/7/2019).

Tindakan korupsi berturut-turut menjadi bukti bahwa betapa kurangnya upaya yang dilakukan aparat desa dalam melakukan pencegahan terhadap *Fraud*. Namun fenomena yang terjadi tidak berhenti disini, sesuai dengan pernyataan di atas bahwa terjadi setiap tahun. Maka di tahun selanjutnya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus korupsi dana desa berhasil ditangkap. Dilansir dari Jatim.inews.id yakni tersangka kabur dari rumah karena terseret kasus dugaan korupsi dana desa sebesar Rp.600 juta, dan berhasil ditangkap pada bulan Februari tahun 2020.

Kasus korupsi dana desa di kabupaten situbondo pada tahun 2021 kembali hadir di dalam pemberitaan media. Bersumber dari jatim.antaranews.com yakni mantan kepala desa yang menjadi terdakwa kasus korupsi penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kasus korupsi dana desa akan terus berlanjut jika tidak ada perkembangan dalam melakukan upaya pencegahan tindakan *Fraud*.

Uraian di atas selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya, yakni Widyawati (2019) dengan judul Pengaruh Bystander Effect, *Whistleblowing*, Asimetri Informasi Dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Busungbiu. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *bystander effect* dan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, *Whistleblowing* dan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021). Judul penelitian pengaruh moralitas individu, kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini adalah moralitas individu, kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di kecamatan bathin solapan kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut peneliti dapat mengambil hipotesis bahwa moralitas, religiusitas, sistem pengendalian internal dan *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut pula peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencegahan *Fraud* dengan judul “Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa” (*Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Situbondo?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Situbondo?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Situbondo?
4. *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Moralitas terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Situbondo
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Situbondo
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Situbondo

4. Untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Situbondo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang dapat memberikan pandangan dan pengetahuan serta rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan topik fenomena mengenai pengaruh *Whistleblowing system*, Sistem pengendalian Internal, Moralitas dan Religiusitas terhadap pencegahan *Fraud* Keuangan Desa

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pemahaman terkait dengan upaya pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan dana desa dan juga dijadikan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelas sarjana (S1)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu terkait Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing* dalam pencegahan *Fraud* :

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Analisis data	Hasil Penelitian
1.	Kadek Yulis Diana Dewi, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, Edy Sujana , 2018, Pengaruh Bystander Effect, <i>Whistleblowing</i> , Asimetri Informasi Dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Busungbiu	Independen : Bystander Effect, <i>Whistleblowing</i> , Asimetri Informasi Dan Religiusitas Dependen : Kecenderungan Kecurangan	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. bantuan program SPSS versi 23	(1) bystander effect dan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, (2) <i>Whistleblowing</i> dan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan

2.	<p>Komang Agus Sudarma, I Gusti Ayu Purnamawati, Nyoman Trisna Herawati, 2019, Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran dan <i>Whistleblowing system</i> Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan</p>	<p>Independen : Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran dan <i>Whistleblowing system</i></p> <p>Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>Menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran dengan skala likert. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25.</p>	<p>Persepsi karyawan mengenai budaya kejujuran dan <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>Fraud</i>.</p>
3.	<p>Ni Putu Agustina Widyawati, Edy Sujana, Gede Adi Yuniarta, 2019, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, <i>Whistleblowing</i></p>	<p>Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia, <i>Whistleblowing system</i>, dan Sistem</p>	<p>Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuisisioner dan</p>	<p>kompetensi sumber daya manusia, <i>Whistleblowing system</i> dan sistem pengendalian internal</p>

	<p><i>system</i>, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Bumdes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng)</p>	<p>Pengendalian Internal</p> <p>Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>diukur dengan menggunakan skala likert. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria BUMDes</p>	<p>berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>Fraud</i>.</p>
4.	<p>Azzukhruf Harfiansyah, Abdul Ghofar, 2019, Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing system</i>, dan Integritas Terhadap Kecurangan Akuntansi Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Independen : Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing system</i>, dan Integritas</p> <p>Dependen : Kecurangan Akuntansi</p>	<p>Penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai BPR di Kota Malang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Teknik non probability</p>	<p>Pengendalian internal dan <i>Whistleblowing system</i> sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan integritas sebelum dan pada masa</p>

			sampling dengan menggunakan teknik insidental.	Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi
5.	Komang Candra Restalini Anandya, Desak Nyoman Sri Werastuti, 2020, Pengaruh <i>Whistleblowing system</i> , Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali	Independen : <i>Whistleblowing system</i> , Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Menggunakan metode Kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala yang digunakan yaitu skala likert.	<i>Whistleblowing system</i> , budaya organisasi dan moralitas individu memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan <i>Fraud</i> . Artinya semakin tinggi (ketiga variable tersebut) maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan <i>Fraud</i> nya.
6.	Istiqomah Nur Frida, 2021, Pengaruh	Independen : Religiusitas	Metode yang digunakan adalah	Hasil studi ini religiusitas

	Religiusitas Terhadap Kinerja Pegawai Melalui niat <i>Whistleblowing</i>	Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	metode kuantitatif explanatory research dengan sampel sebanyak 60 orang dari 220 pegawai di BUNA.	berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat melakukan <i>Whistleblowing</i> .
7.	Wahyudi, 2021, Pengaruh moralitas individu, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap pencegahan <i>Fraud</i> pengelolaan keuangan desa	Independen : moralitas individu, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Data dianalisis menggunakan program	Moralitas Individu, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan

			SPSS versi 25.	<i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
8.	Ririn Melati, Agustiawan, Siti Rodiah, 2022, Pengaruh Budaya Organisasi, <i>Proactive Fraud Audit, Whistleblowing</i> , dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah di Pekanbaru)	Independen : Budaya Organisasi, <i>Proactive Fraud Audit, Whistleblowing</i> , dan Pengendalian Internal Dependen : Pencegahan Kecurangan	Metode pengumpulan sampel menggunakan metode <i>sampling jenuh</i> . Sampel yang diambil sebanyak 113 sekolah. Uji analisis data menggunakan metode regresi linier berganda yang pengolahannya dengan menggunakan SPSS 25.	Budaya organisasi, <i>proactive Fraud audit</i> dan <i>Whistleblowing</i> berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana BOS. Sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan

				dalam Pengelolaan Dana BOS.
9.	Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, Wahyu Anggit Prasetya, 2022, Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing system</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa	Independen : Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing system</i> Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling,	Pelaporan keuangan dan <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
10	Muhamad Bagus Fahreza, Wawan Sadtyo Nugroho, Anissa Hakim Purwantini, 2022, Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing system</i> , dan Kompetensi Aparatur	Independen : Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing system</i> , dan Kompetensi Aparatur Desa	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei secara langsung kepada responden	Kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif sedangkan kompetisi

	Desa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo)	Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	sebagai objek penelitiannya.	aparatur desa berpengaruh negatif terhadap pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
--	---	------------------------------------	------------------------------	---

Sumber data : data diolah peneliti, 2022.

Pada tabel 2.1 menunjukkan penelitian terdahulu yang memiliki beragam variabel dan juga hasil penelitian. Pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun persamaannya terletak pada variabel dependen yaitu variabel pencegahan *Fraud* dan variabel independen yaitu variabel moralitas, religiusitas, sistem pengendalian internal dan *Whistleblowing system*. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah objek penelitian ini menggunakan beberapa aparatur desa yang berkecimpung dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Situbondo.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Moralitas

Menurut Bertens (1993) Moral mempunyai arti nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kata moral yang berasal dari bahasa Latin secara etimologis mirip dengan kata etika yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat istiadat.

Moralitas dapat diartikan sebagai segala prinsip dan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya sifat manusia.

Teori perkembangan moral yang sering digunakan dalam penelitian tingkat etika adalah model Kohlberg. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis. Menurut Kohlberg (1971) tahapan perkembangan moral merupakan ukuran tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Ia melakukan penelitian berdasarkan kasus dilema moral untuk mengamati perbedaan perilaku individu dalam menyikapi permasalahan moral yang sama. Kemudian dia mengklasifikasikan respons masing-masing individu ke dalam enam tahap berbeda. Tahapan perkembangan moral ada tiga, yaitu tahap pra-konvensional, tahap konvensional, dan tahap pasca-konvensional.

2.3 Pre-conventional

Individu yang berada di tingkat ini mengenal moralitas saat melakukan suatu perbuatan baik dan buruk berdasarkan dampak yang ditimbulkan dapat berupa hal menyenangkan (reward) maupun hal menyakitkan (punishment). Individu tersebut tidak ingin melanggar peraturan karena takut dengan ancaman hukuman dari pihak otoritas.

2.4 Conventional

Individu pada tingkat ini akan menilai suatu tindakan baik jika sesuai dengan harapan otoritas atau kelompok sejawatnya. Individu memiliki dasar pertimbangan moral yang berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial di masyarakat, kewajiban, dan keadilan dalam lingkungan

sosialnya. Manajemen pada tahap ini mulai membentuk moralitas manajemennya dengan menaati peraturan seperti aturan akuntansi untuk menghindari kecurangan.

2.5 Post-Conventional

Individu telah menunjukkan kematangan moral manajemen yang lebih tinggi. Kematangan moral merupakan dasar pertimbangan manajemen saat menyikapi isu-isu etis terkait perilaku pertanggungjawaban sosial pada orang lain. Berdasarkan tanggung jawab sosial, manajemen yang mempunyai moralitas tinggi diharapkan tidak akan melakukan perilaku yang menyimpang serta potensi kecurangan dalam akuntansi karena tindakannya dilakukan dengan berkaca pada hukum universal. Individu yang berada di tingkat ini menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal. Hal ini disebabkan karena pada level ini, aturan dalam kehidupan masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai subjek.

2.2.2 Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa Inggris “religion” yang berarti agama, kemudian menjadi kata sifat “religios” yang berarti agama atau saleh (Remaja Rosdakarya, 2004). Kahmad mengartikan agama sebagai kata kerja yang berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu a yang berarti “tidak” dan gama yang berarti “kacau”. Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau (Kahmad Dadang, 2000).

Dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan kata al-din dan al-milah. Kata al-din sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti al-mulk (kerajaan), al-khidmat (pelayanan), al-izz (kejayaan), al-dzull (kehinaan), al-ikrah (pemaksaan), al-ihsan (kebajikan), al-adat (kebiasaan), alibadat (pengabdian), al-qahr wa al-sulthan (kekuasaan dan pemerintahan), altadzallul wa al-khudu (tunduk dan patuh), al-tha'at (taat), al-islam al-tauhid (penyerahan dan mengesakan Tuhan).

Sedangkan dalam etimologi kuno, religi berasal dari bahasa Latin “religio” yang akar katanya adalah “re” dan “ligare” yang mengandung arti mengikat kembali, hal ini menunjukkan bahwa dalam arti religi terdapat aturan-aturan dan kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya dengan sesama, alam dan Tuhan (Driyarkarya, 1988).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius berarti bersifat religi atau keagamaan, atau yang bersangkutan paut dengan religi (keagamaan). Menurut Shihab menjelaskan bahwa religiusitas itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) Dalam kamus sosiologi religiusitas adalah bersifat keagamaan atau taat beragama
- 2) Religiusitas merupakan sebuah penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci

3) Religiusitas sebagai wujud interaksi harmonis antara pihak yang lebih tinggi kedudukannya (yaitu Allah SWT), dari yang lain (yaitu makhluk), menggunakan tiga konsep dasar yaitu iman, Islam dan ihsan (Quraish Shihab, 2006).

Daradjat mengartikan bahwa religiusitas merupakan suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama (being religious) dan bukan sekedar mengaku punya agama. Yang meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengalaman ritual agama, perilaku (moralitas agama) dan sikap sosial keagamaan. Dalam Islam religiusitas dari garis besarnya tercermin dalam pengalaman aqidah, syariah dan akhlak, atau dalam ungkapan lain; Iman, Islam dan Ihsan. Bila semua unsur itu telah dimiliki seseorang maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya⁸¹. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Ikhlas menjelaskan.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {1} اللَّهُ الصَّمَدُ {2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ {4}

Yang artinya: Katakanlah. “Dialah Allah yang maha Esa (1) Hanya Allah lah tempat bergantung (2) Dia tidak beranak serta Dia tidak pula diperanakan (3) Dan tiada satupun yang setara dengan Dia (4).

Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, memikirkan dampak dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas (behave in a sensible manner). Teori ini memberikan suatu

kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap perilakunya. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku. Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif.

Menurut Jalaluddin religiusitas bukan merupakan aspek psikis bersifat instinktif, atau unsur bawaan yang siap pakai. Religiusitas juga mengalami proses perkembangan dalam mencapai tingkat kematangannya. Religiusitas tidak luput dari berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Pengaruh tersebut baik yang bersumber dalam diri seseorang maupun yang bersumber dari faktor luar, faktor-faktor itu antara lain;

1) Faktor Internal.

Faktor ini di tentukan oleh faktor ekstern dan juga ditentukan oleh faktor intern seseorang. Meliputi aspek kejiwaan lainnya. Tetapi, secara garis besarnya faktor-faktor yang ikut berpengaruh dapat dikategorikan menjadi faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian dan kondisi kejiwaan seseorang.

- a) Faktor hereditas adalah Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun-menurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif dan konatif. Selain itu Rasulullah juga menganjurkan untuk memilih pasangan hidup yang baik dalam

membina rumah tangga, sebab menurut keturunan akan berpengaruh dan menentukan keharmonisan.

- b) Tingkat usia adalah berbagai penelitian psikologi agama menunjukkan adanya hubungan tingkat usia dengan kesadaran beragama, meskipun tingkat usia bukan satu-satunya faktor penentu dalam kesadaran beragama seseorang. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman agama pada tingkat usia yang berbeda.
- c) Kepribadian adalah sebagai identitas diri atau jati diri seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain di luar dirinya. dalam kondisi normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap aspek-aspek kejiwaan termasuk kesadaran beragama.
- d) Kondisi kejiwaan adalah banyak kondisi kejiwaan yang tak wajar seperti *schizophrenia*, *paranoia*, *maniac*, dan *infatible autism*. Tetapi yang penting dicermati adalah hubungannya dengan perkembangan kejiwaan agama. Sebab bagaimanapun seseorang yang mengidap *schizophrenia* akan mengisolasi diri dari kehidupan sosial serta persepsinya tentang agama akan dipengaruhi oleh halusinasi.

2) Faktor Eksternal.

Faktor ekstern yang dinilai berpengaruh dalam religiusitas dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang itu hidup. Umumnya

lingkungan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan institusional, lingkungan masyarakat.

- a) Lingkungan keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama kali yang dikenal setiap individu. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan pada tiap individu, dan keluarga merupakan sosok panutan utama bagi seorang individu.
- b) Lingkungan institusional yang berisi materi pengajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar sekolah dinilai berperan penting dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dan pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang.
- c) Lingkungan masyarakat sepintas, bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal ini terdiri dari hereditas, usia,

kepribadian dan kejiwaan seseorang. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pendidikan, pengalaman dan lingkungan seseorang.

2.2.3 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern atau pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian dimana dapat diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan untuk menyusun laporan keuangannya lebih berhati-hati, mencegah kecurangan dalam organisasi, dan mengamankan harta organisasi (Jurnal, JAAI Vol. 17 No.1, 2013). Menurut IAI dalam SPAP, pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan ini keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada, efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Rika (2013) dalam beroperasi, organisasi membutuhkan suatu mekanisme yang mengatur alur-alur kerja dan pengelolaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Rasyid (2013) Organisasi memiliki komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yaitu: administrasi, manajemen, kepemimpinan dan human relation. Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan sistem prosedur yang diimplementasikan oleh manajemen perusahaan dan dewan direksi, serta dirancang untuk memenuhi lima tujuan berikut:

- a. Menjaga aset. Perusahaan harus menjaga asetnya dari pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan.

- b. Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan. Semua orang dalam organisasi- manajer dan karyawan – harus bekerja mencapai tujuan yang sama. Sistem pengendalian yang memadai menyediakan kebijakan yang jelas yang menghasilkan perlakuan yang adil baik bagi pelanggan maupun karyawan.
- c. Mempromosikan efisiensi operasional. Perusahaan tidak boleh memboroskan sumber dayanya. Pengendalian yang efektif akan meminimalkan pemborosan, yang menurunkan biaya dan meningkatkan laba.
- d. Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Catatan yang akurat merupakan hal yang penting bagi perusahaan.
- e. Menaati persyaratan hukum. Pengendalian internal yang efektif akan membantu memastikan ketaatan terhadap hukum dan membantu menghindari kesulitan hukum.

Jadi dari definisi di atas, pengendalian intern adalah salah satu bentuk pengendalian yang berguna bagi pimpinan untuk menyusun laporan keuangan supaya lebih berhati-hati, mencegah kecurangan dalam organisasi, dan mengamankan harta organisasi (Walter T. Harrison Jr, dkk. 2010). Terdapat beberapa unsur pengendalian internal, yakni ada lingkungan pengendalian, pebaksiran resiko, Informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan.

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas organisasi antara lain:

- 1) Nilai integrasi dan entitas
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Dewan komisaris dan komite audit
- 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen
- 5) Struktur organisasi
- 6) Pembagian wewenang dan penambahan tanggung jawab.
- 7) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko adalah pengidentifikasian entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ektern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan

keuangan. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan sebagai berikut ini:

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
- 2) Personel baru
- 3) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- 4) Teknologi baru
- 5) Lini produk, produk atau aktivitas baru
- 6) Restrukturisasi korporasi
- 7) Operasi luar negeri
- 8) Standar akuntansi baru

c. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang relevan terhadap tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang telah ditetapkan untuk mencatat, mengolah, mengiktisar dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mngendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual yang berkaitan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

d. Aktifitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tingkatan tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini.

- 1) Review terhadap kinerja
- 2) Pengolahan informasi
- 3) Pengendalian fisik
- 4) Pemisahan tugas

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi keduanya.

2.2.4 *Whistleblowing system*

a. Pengertian *Whistleblowing*

Whistleblowing adalah pengungkapan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau entitas yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (KNKG, 2008). *Whistleblowing* merupakan tindakan mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan yang paling tepat (Akmal, 2012). Menurut Peters dan Branch (1972) mendefinisikan *Whistleblowing* sebagai pengungkapan oleh seseorang mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis, atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat bekerja.

Whistleblowing dapat terjadi dari dalam (internal) ataupun luar (external) organisasi atau entitas. *Whistleblowing* dari luar terjadi ketika karyawan mendapati *Fraud* yang dilakukan oleh karyawan lain kemudian melaporkan kepada atasannya. Sedangkan *Whistleblowing* dari luar terjadi ketika karyawan yang mendapati kecurangan di dalam perusahaan dan kemudian karyawan tersebut menyebarluaskan ke pihak eksternal karena tindakan *Fraud* tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak eksternal (Krehastuti, 2014).

b. Pengertian *Whistleblower*

Whistleblower adalah seseorang yang mengungkapkan suatu pelanggaran. Biasanya pelaku dari tindakan ini ialah berasal dari seorang karyawan di organisasi atau entitas tempat ia bekerja atau biasanya mereka memiliki bukti kuat mengenai tindakan pelanggaran. Menjadi seorang *Whistleblower* membutuhkan perlindungan yang dapat memastikan diri mereka aman dari berbagai ancaman. Hal tersebut dibutuhkan karena biasanya seorang *Whistleblower* mendapatkan banyak sekali ancaman yang sewaktu-waktu akan ditemui ketika ia berusaha untuk mengungkap atau melaporkan tindakan kecurangan. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* di Indonesia mulai ada sejak tahun 2006 melalui Undang-undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya Undang-undang tersebut, diharapkan dapat menjadikan sebuah dorongan terhadap *Whistleblower* untuk lebih berani dalam melaporkan atau mengungkap tindakan kecurangan yang ada di lingkungan sekitar.

Whistleblower mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan kinerja suatu organisasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya batasan baik usia, gender ataupun jabatan untuk menjadi seorang *whistleblower*. Namun, meski siapa pun bisa menjadi *Whistleblower*, namun masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan kecurangan. Karena banyak resiko yang harus ditanggung, dihadapi bahkan sulit untuk dihindari dan alternatif lain yang mereka pilih adalah berdiam diri. Mulai dari pemecatan organisasi tempatnya bekerja hingga melaporkan ancaman terhadap dirinya dan keluarganya. Hal

inilah yang membuat jumlah pelapor lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku *fraud*.

Seorang *whistleblower* dalam upaya mengungkap suatu tindak pelanggaran dan kecurangan, baik di perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan, memang dapat dilatarbelakangi berbagai motivasi, seperti pembalasan dendam ingin “menjatuhkan” perusahaan tempatnya bekerja, mencari “selamat”, atau niat untuk menciptakan lingkungan perusahaan tempatnya bekerja menjadi lebih baik dan lebih beretika. Yang jelas seorang *Whistleblower* memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. *Whistleblower* memiliki suara hati yang memberi petunjuk kuat mengenai pentingnya sebuah skandal untuk diungkap. (LPSK, 2011).

c. *Whistleblowing system*

Menurut Kurt et al. (2009:8-24) menyatakan bahwa *whistleblowing* adalah sarana yang memungkinkan individu untuk melaporkan kekhawatiran mereka tentang kegiatan yang terjadi didalam perusahaan dan tetap anonim. *whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang.udangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (RB POM, 2015).

Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa sehingga kriteria kecurangan yang

dilaporkan meliputi 5W+1H, tindak lanjut atas laporan, penghargaan dan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower, serta hukuman atau sanksi bagi yang dilaporkan. . Sistem ini merupakan sarana atau saluran bagi pelapor untuk mengungkap dan melaporkan tindakan kecurangan. Menurut Zimbelman (2009), sistem *whistleblowing* yang efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan harus memiliki empat elemen sebagai berikut:

1. Anonimitas

Sistem yang baik harus selalu menjaga kerahasiaan identitas para pelapor, karena tidak akan adanya rasa takut untuk melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan di dalam organisasi atau entitas.

2. Independensi

Pelaporan yang diterima harus ditindaklanjuti oleh pihak yang independen atau pihak yang tidak mempunyai keterkaitan dengan pihak organisasi atau entitas maupun pihak yang melakukan pelanggaran.

3. Akses yang mudah

Supaya whistleblower merasa mudah melaporkan tindak kecurangan. Sistem pelaporan pelanggaran harus memiliki berbagai macam saluran untuk melaporkan pelanggaran. Contoh saluran pelaporan pelanggaran seperti melalui telepon, email, sistem online, dan faximile.

4. Tindak lanjut

Laporan yang sudah diterima kemudian ditindaklanjuti untuk menentukan tindakan yang harus diperlukan dalam menyelidiki suatu pelanggaran. Hal ini akan menunjukkan manfaat dari sistem pelaporan pelanggaran dan mendorong para whistleblower untuk lebih aktif melaporkan tindak pelanggaran.

Adapun beberapa manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik menurut KNKG, antara lain :

- 1) Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman
- 2) Timbulnya keengganan untuk melakukan kecurangan, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya kecurangan, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif
- 3) Tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran
- 4) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik
- 5) Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi
- 6) Mengurangi biaya dalam menangani akibat terjadinya pelanggaran
- 7) Meningkatnya reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat umum

- 8) Memberikan masukan kepada perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

d. Indikator *whistleblowing system*

Di dalam Pedoman *Whistleblowing system* yang diterbitkan KNKG (2008), sistem *whistleblowing system* terdiri dari 3 aspek, yaitu :

1) Aspek Struktural

Aspek struktural merupakan aspek yang berisikan elemen-elemen infrastruktur *whistleblowing system*. Aspek ini berisikan 4 elemen, yaitu:

a) Pernyataan Komitmen

Perlu adanya pernyataan komitmen dari seluruh pegawai mengenai kesediaannya untuk menerapkan sistem *whistleblowing* dan berpartisipasi aktif dalam pelaporan jika menemukan adanya pelanggaran. Secara teknis, pernyataan ini dapat dibuat tersendiri atau dijadikan bagian dari Perjanjian Kerja Bersama, atau bagian dari pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan.

b) Kebijakan Perlindungan Pelapor

Perusahaan harus mampu membuat kebijakan perlindungan whistleblower. Kebijakan ini menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan perusahaan akan mematuhi seluruh peraturan perundang-

undangan terkait serta praktik terbaik yang berlaku dalam penerapan sistem *whistleblowing*. Kebijakan ini juga menjelaskan bahwa tujuan perlindungan pelapor adalah untuk mendorong pelaporan pelanggaran dan kecurangan, serta menjamin keselamatan pelapor dan keluarganya.

c) Struktur Pengelolaan *Whistleblowing system*

Perusahaan harus membentuk unit pengelola sistem *whistleblowing* yang bertanggung jawab kepada Direksi dan Komite Audit. Unit ini harus independen dari operasional perusahaan sehari-hari dan mempunyai akses terhadap pimpinan puncak perusahaan. Unit pengelola *whistleblowing system* mempunyai 2 unsur utama yaitu sub unit perlindungan whistleblower dan sub unit investigatif. Penunjukan pejabat pelaksana unit ini harus dilakukan oleh pihak yang profesional dan independen, sehingga hasil yang diperoleh relatif lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari unsur kepentingan pribadi.

d) Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan *whistleblowing system* adalah kecukupan kualitas dan jumlah personel untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pengelola *whistleblowing system*, dan media komunikasi sebagai sarana pelaporan pelanggaran.

2) Aspek Operasional

Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kerja sistem *whistleblowing*. Harus ada mekanisme penyampaian

laporan pelanggaran yang dapat memudahkan pegawai dalam menyampaikan laporan pelanggaran. Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran, baik berupa email dengan alamat khusus yang tidak dapat ditembus oleh bagian Teknologi Informasi (IT) perusahaan, atau kotak pos khusus yang hanya dapat diakses oleh Pelanggar. Petugas Sistem Pelaporan, atau saluran telepon khusus yang akan ditangani oleh petugas khusus juga. Informasi mengenai keberadaan saluran atau sistem dan tata cara penggunaannya harus dikomunikasikan secara luas kepada seluruh karyawan. Begitu pula dengan diagram alir penanganan pelaporan pelanggaran harus disosialisasikan secara luas dan dipajang di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh karyawan perusahaan. Tata cara penyampaian laporan pelanggaran juga harus dicantumkan. Apabila pelapor melihat pelanggaran dilakukan oleh petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan pelanggaran tersebut harus disampaikan langsung kepada Direktur Utama perusahaan.

Selain itu, kebijakan kerahasiaan dan perlindungan pelapor juga harus diperhatikan. Perusahaan juga harus mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya dengan memberikan kekebalan sanksi administratif kepada pelapor yang beritikad baik. Pelapor harus mendapat informasi mengenai penanganan perkara yang dilaporkannya dan perkembangannya apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Petugas pelaksana unit *whistleblowing* system dapat segera melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait

kasus yang dilaporkan. Hal ini untuk mengetahui apakah laporan kecurangan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Efektivitas penerapan sistem *Whistleblowing* antara lain bergantung pada:

- a) Kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran mau untuk melaporkannya
- b) Sikap perusahaan terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh pelapor pelanggaran
- c) Kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar perusahaan jika manajemen tidak mendapatkan respon sesuai

Pada proses peluncuran *whistleblowing system*, perusahaan harus menyusun aspek struktural dan operasional terlebih dahulu. Kemudian perusahaan mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh karyawan. Setelah itu, sistem ini dapat diresmikan.

3) Aspek Perawatan

Aspek pemeliharaan merupakan aspek yang memastikan bahwa sistem *whistleblowing* ini dapat berkelanjutan dan meningkatkan efektivitasnya. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawannya, termasuk petugas unit *whistleblowing system*. Selain itu, perusahaan juga harus berkomunikasi secara berkala dengan karyawan mengenai hasil penerapan sistem *whistleblowing*. Pemberian insentif atau reward yang dilakukan perusahaan kepada pelapor dapat mendorong karyawan lain yang menyaksikan namun tidak melapor menjadi tertarik untuk

melaporkan pelanggaran. Penerapan sistem *whistleblowing* memerlukan pemantauan berkala terhadap efektivitasnya. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem memenuhi target yang telah ditetapkan di awal program dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sejalan dengan tuntutan bisnis perusahaan. Yang memantau pelaksanaan *whistleblowing* system adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit atau Satuan Pengawasan Internal.

Dengan demikian, *whistleblowing system* adalah pemahaman atau interpretasi karyawan mengenai *whistleblowing system*. Dalam hal ini, karyawan menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam *whistleblowing system*.

2.2.5 Pencegahan *Fraud*

Whistleblowing adalah pengungkapan pelanggaran atau pengungkapan suatu tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang tidak etis/tidak bermoral atau tindakan lain yang dapat merugikan organisasi atau entitas yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (KNKG, 2008). *Whistleblowing* merupakan perbuatan untuk mencegah, menghalangi kecurangan, kerugian dan peyalahgunaan yang paling tepat (Staley dan Lan dalam Akmal, 2012). Menurut Peters dan Branch (1972) mendefinisikan *Whistleblowing* sebagai pengungkapan oleh seseorang mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis, atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi,

penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat bekerja.

Menurut *Statement on Auditing Standard (SAS) No 99, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* dan Arens, *et al.* dalam Rahmatika (2020:15) menjelaskan konsep *Fraud Triangle* ialah pemicu atas terjadinya *Fraud*. Tindakan kecurangan terjadi karena seperangkat suatu kondisi yang kondusif bagi terjadinya tindakan tersebut. Seperangkat kondisi tersebut dikenal sebagai kondisi penyebab kecurangan (*condition for Fraud*).

Donald R. Cressey dalam Irianto dan Novianti (2018:42) mengembangkan teori *Fraud Triangle* berdasarkan pada penelitiannya mengenai penyebab mengapa orang-orang memutuskan untuk melakukan *Fraud* dengan menyebutnya sebagai *trust violator*. Responden dari penelitian Cressey terdiri dari orang-orang yang diputuskan sebagai pelaku *Fraud* oleh pengadilan. Penelitian tersebut menunjukkan terdapat 3 alasan utama mengapa seseorang melakukan *Fraud*. Teori ini juga mengemukakan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, namun mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Maka dari itu, dari penjelasan di atas mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan *Fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi).

a. *Pressure* (dorongan)

Pressure (tekanan) memiliki berbagai macam arti, diantaranya ialah keadaan dimana kita merasa ditekan, kondisi yang membebani saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dapat kita artikan bahwa *Pressure* bisa mendapatkan perhatian lebih namun di lain sisi dapat menjadi penyebab atas munculnya *Fraud* sehingga suatu dorongan menjadi salah satu bagian dari *Fraud triangel*. Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *pressure* adalah sebuah dorongan yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan (*Fraud*). Misalnya hutang atau adanya tagihan yang menumpuk sedangkan dirinya mengalami pemerosotan pendapatan, gaya hidup yang dipaksa mewah, ketergantungan terhadap narkoba dan lain-lain. Pada dasarnya penyebab terjadinya *fraud* karena adanya kebutuhan atau masalah dalam segi keuangan, namun banyak juga yang disebabkan oleh keserakahan.

b. *Opportunity* (peluang)

Opportunity merupakan suatu peluang atau kesempatan yang ada pada setiap orang atau individu dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan atas kesempatan tersebut akan cenderung negatif jika diiringi dengan adanya tekanan atau *pressure*, hal inilah yang memungkinkan

terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*). Opportunity merupakan elemen yang paling mendasari diantara ketiga elemen *Fraud triangel*. Kesempatan ini dapat muncul kapan saja dan dimana saja, sehingga diperlukan adanya sistem pengendalian internal yang bagus untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tindakan kecurangan (*Fraud*). Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan tindakan kecurangan ini jika memiliki peluang yang sangat besar.

c. *Rationalization* (rasionalisasi)

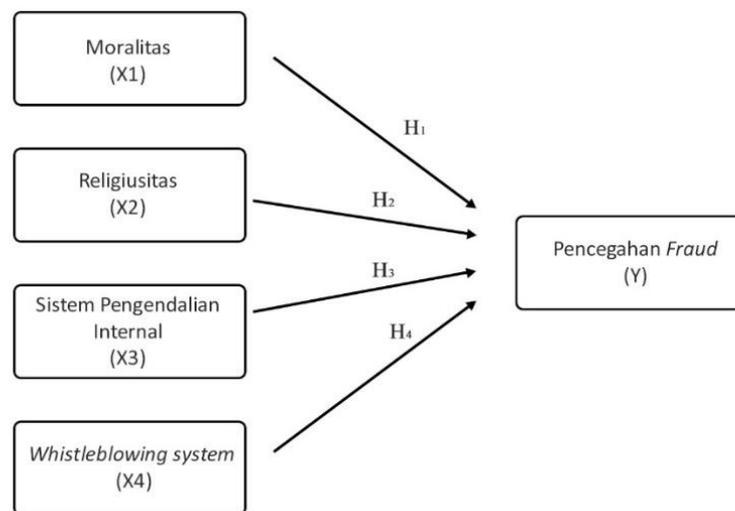
Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan pembelaan diri dengan mencari berbagai macam alasan pembenaran oleh orang-orang karena sedang terjebak dalam suatu kondisi yang sangat buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kecurangan yang sudah dilakukan agar kiranya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane (2003) rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan. Secara tidak langsung rasionalisasi menjembatani tindakan kejahatan agar dapat dibenarkan. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya tindakan kecurangan, dimana pelaku terus mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya; pelaku melakukan hal tersebut untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya dan telah diuraikan, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka konseptual sebagai berikut ini :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber : data diolah peneliti, 2023.

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berfikir yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan *Fraud*

Kecurangan dapat dicegah dengan baik jika sikap dari masing-masing individu tergolong baik, sikap tersebut sering disebut dengan moralitas (Purwitasari, 2013). Menurut teori dari (Kohlberg, 1995) tentang level penalaran moral menyatakan bahwa tingkatan dari masing-masing penalaran individu dapat menjadi cerminan bagaimana individu tersebut akan melakukan

tindakan. Level penalaran moral ini juga dapat dikaitkan dalam hal dilema etika. Pencegahan kecurangan sangat erat kaitannya dengan moralitas. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang cukup berpengaruh di suatu perusahaan dapat melakukan tindakan yang tidak benar dikarenakan memiliki suatu *capability/capacity* (kemampuan), ini merupakan sifat berasal dari dalam individu yang melakukan suatu kecurangan yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Elemen kemampuan merupakan bagian dari teori dasar yang diuji dalam penelitian, yakni *Fraud* diamond. Konsep teori baru ini diusulkan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) menyatakan bahwa moralitas individu secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis. Candra (2020) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa moralitas individu memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan *Fraud*. Artinya semakin tinggi (ketiga variable tersebut) maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan *Fraud*nya. Berlandaskan hal tersebut, maka hipotesis penelitian yang bisa dirumuskan yaitu:

H1 : Moralitas Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud*.

2.4.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Pencegahan *Fraud*

Religiusitas merupakan tingkat pemahaman agama yang mendasari dalam pembuatan keputusan seseorang dalam melakukan tindakan. Religiusitas adalah tingkat kepercayaan yang mutlak dalam nilai-nilai agama dan cita-cita

yang dijalankan dan dilaksanakan oleh seseorang (Satrya et al., 2019). Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan kecurangan yang terjadi, karena tau bahwa kecurangan merupakan hal yang bertentangan dengan agama, dan jika ia membiarkan hal tersebut maka ia akan merasa berdosa. Seseorang sebelum melakukan tindakan *Whistleblowing* juga akan merasa yakin bahwa yang dilakukannya benar. Semakin tinggi tingkat religiusitas, maka semakin tinggi pula niat seseorang untuk melakukan tindakan *Whistleblowing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agnes (2023) menyimpulkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* pedagang di pasar tradisional tahunan jepara. Anita (2023) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pada ekowisata mangrove. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H2 : Religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Sistem pengendalian internal merupakan perencanaan meliputi metode, alat, struktur organisasi yang dikoordinasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dilakukan oleh manajemen (Pratolo et al., 2016).

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian sebelumnya (Fahreza, dkk. 2022) didapat bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*. Yang artinya semakin baik tingkat pengendalian internal dalam sebuah pemerintahan desa maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan

Fraud, sebaliknya semakin rendah pengendalian internal maka semakin rendah pula pencegahan *Fraud* dalam pemerintahan desa. Pada penelitian tersebut teori agensi, teori agensi memunculkan masalah keagenan yakni asimetri informasi, asimetri informasi terjadi karena perbedaan informasi yang dimiliki diantara agent dan juga principal. Asimetri informasi dapat diselesaikan dengan yakni bounding mechanism dan juga monitoring, Sistem pengendalian internal termasuk dalam penyelesaian asimetri informasi berupa bounding mechanism yakni penyelesaian masalah keagenan yang berasal dari pihak internal. Asimetri tidak terjadi dalam pemerintahan desa ketika pengendalian internal dalam pemerintahan desa tersebut tinggi karena dalam lingkungan pengendalian tersebut dapat memantau *Fraud* baik yang akan terjadi maupun sedang terjadi.

Widyawati (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* dengan good corporate governance sebagai variabel intervening. Hartono (2022) dalam penelitiannya juga memaparkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* dengan intervening good corporate governance Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*

2.4.4 Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud*

Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa terdapatnya sebuah mekanisme dalam pendeteksian dini jika terjadi suatu masalah dari adanya pelanggaran adalah salah satu manfaat dari *Whistleblowing system*. (Miceli, dkk. 2008) menyatakan bahwa *Whistleblowing* ialah sebuah pemberitahuan atau penyampaian informasi dari salah satu anggota organisasi maupun perusahaan atau pihak lain dari organisasi, dimana penyampaian ini berhubungan mengenai perilaku menyimpang atau diluar dari peraturan yang berlaku oleh seseorang yang melakukannya di dalam ruang lingkup perusahaan. Seseorang yang menyampaikan ini sering disebut dengan istilah whistleblower.

Adanya sistem ini bukan hanya bertujuan sebagai sarana untuk menyalurkan tindakan kecurangan, namun sistem ini juga secara tidak langsung menjadi sebuah sarana untuk mengawasi kegiatan antar anggota. Keberadaan sistem ini, memberikan efek takut kepada setiap karyawan untuk melakukan kecurangan karena pada saat melakukan kegiatan satu sama lain telah melakukan pengawasan. Hal inilah yang menyebabkan dapat mencegah suatu tindakan *Fraud* yang akan terjadi.

Adapun penelitian oleh (Ririn, 2022) serta (Komang, 2019) menghasilkan suatu simpulan yang sama yakni variabel *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H4 : *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan dapat melakukan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah data primer, dimana data yang diperoleh melalui kuesioner kepada responden yang telah ditetapkan.

3.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Situbondo. Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha tambak udang serta perikanan. Situbondo memiliki potensi perekonomian yang baik terutama di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Kabupaten Situbondo memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar meliputi pembenihan, budidaya air payau, budidaya laut, dan air tawar, penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan.

Dalam pemerintahan, secara administratif Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 kecamatan, 4 kelurahan, dan 132 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 681.280 jiwa dengan luas wilayah 1.669,87 km² dan sebaran penduduk 408 jiwa/km².

Peneliti memilih Kabupaten Situbondo sebagai lokasi penelitian karena dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten ini kerap muncul di laman berita karena

tindakan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa aparaturnya. Pada tahun 2021, kasus korupsi dana desa di kabupaten situbondo kembali hadir setelah sebelumnya terjadi kasus serupa di bulan juni 2019 dalam pemberitaan media. Bersumber dari jatim.antaranews.com yakni mantan kepala desa yang menjadi terdakwa kasus korupsi penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kasus korupsi dana desa akan terus berlanjut jika tidak ada perkembangan dalam melakukan upaya pencegahan tindakan *Fraud*.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi menurut (Sugiyono, 2010: 115) merupakan wilayah yang terdiri dari objek dan subjek yang keduanya memiliki karakteristik dan berkualitas untuk dipelajari sampai akhirnya peneliti menarik sebuah kesimpulan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa jenis objek, jumlah objek, dan karakteristik dari objek tersebut. Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pengelola dana desa yang berada di wilayah Kecamatan Arjasa, Asembagus, Jangkar, Kapongan, dan Mangaran kabupaten Situbondo. Wilayah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan teori serta zona terdekat dari area yang berpotensi adanya tindakan kecurangan.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2017: 81). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur, kasie dan staff. Jumlah desa di wilayah Kecamatan Arjasa, Asembagus, Jangkar, Kapongan, dan Mangaran ialah sebanyak 42 desa. Setiap desanya terdapat 6 responden sehingga jumlah keseluruhannya yakni sebanyak 252 responden. Sampel tersebut diambil berdasarkan teori purposive sampling yang sudah ditetapkan oleh peneliti dengan beberapa ketentuan mulai dari ciri serta kriterianya.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengambilan sampel yang Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan pada penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono, (2016: 85). Menurut Dana (2020) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2010) menjelaskan bahwa teknik

purposive sampling dilakukan atas dasar pertimbangan dari peneliti terhadap populasi. Pertimbangan itu seperti sifat dan ciri dari populasi.

3.5 Data dan Jenis data

Menurut Susetyo (2010) data adalah bentuk jamak dari datum yang berarti “banyak”. Data merupakan kumpulan fakta, keterangan atau angka-angka yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan (Sugiyono, 2013). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan penelitian yang ditujukan kepada responden aparatur desa di kabupaten situbondo, antara lain;

1. Kecamatan Arjasa sebanyak 8 desa
2. Kecamatan Asembagus sebanyak 10 desa
3. Kecamatan Jangkar sebanyak 8 desa
4. Kecamatan Kapongan sebanyak 10 desa
5. Kecamatan Mangaran sebanyak 6 desa

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei secara langsung kepada responden sebagai objek penelitiannya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). Apabila responden tidak bisa ditemui secara langsung atau terkendala lainnya, maka peneliti menyediakan kuesioner secara online melalui google form.

Responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Penggunaan kuesioner akan disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan harapan peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan survei dan pertanyaan yang kurang dipahami responden. Kesungguhan dan kejujuran responden dalam menjawab setiap pertanyaan pada kuesioner merupakan hal yang sangat penting, mengingat teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner sehingga tidak ada pertanyaan yang kurang dipahami responden (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022).

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada responden dengan cara menghubungi responden secara pribadi dan peneliti akan menjelaskan kepada responden bahwa penelitian yang akan dilakukan hanya untuk kepentingan semata dan identitas responden akan dirahasiakan. Dalam penelitian ini akan menggunakan skala likert sebagai pernyataan kuesioner penelitian.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah konsep memiliki nilai yang bermacam-macam sehingga harus diukur dan menentukan variabel di lapangan dengan singkat dan baik. Variabel dapat diartikan sebagai ukuran baik tidaknya suatu konsep yang bernilai dan bisa dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Variabel dalam penelitian ini dibedakan dalam dua kategori utama, yaitu variabel terikat (dependent) dan

variabel bebas (independent). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah/memengaruhi suatu variabel lain (variabel terikat). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Moralitas (X1), Religiusitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3) dan Whistleblowing system (X4). Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, maka dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Pencegahan Fraud (Y). Adapun indikator-indikator variabel penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Moralitas (X1)	a. <i>Pre-conventional</i> b. <i>Conventional</i> c. <i>Post-conventional</i>	Diukur melalui angket (kuesioner) menggunakan skala likert
2.	Religiusitas (X2)	a. Dimensi keyakinan b. Dimensi praktek agama c. Dimensi pengalaman d. Dimensi pengetahuan agama e. Dimensi pengamalan agama.	Diukur melalui angket (kuesioner) menggunakan skala likert
3.	Sistem Pengendalian Internal (X3)	a. Pemisahan Tanggung Jawab Fungsional b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan c. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi d. Mutu Karyawan yang Sesuai dengan Tanggung Jawab.	Diukur melalui angket (kuesioner) menggunakan skala likert
4.	<i>Whistleblowing system</i> (X4)	a. Aspek struktural b. Aspek operasional	Diukur melalui angket (kuesioner)

		c. Aspek perawatan	menggunakan skala likert
5.	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	a. Korupsi	Diukur melalui angket (kuesioner) menggunakan skala likert
		b. Penyalahgunaan aset	
		c. Pelaporan Keuangan yang Menyesatkan	

Sumber data : data diolah peneliti, 2023.

3.8 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kuantitatif. Program yang digunakan untuk mengolah data dari penelitian ini adalah program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 25. Metode ini menggambarkan hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas.

3.8.1 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item (Ghozali, 2013). Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi Product Moment dari Pearson, dengan kesimpulan tingkat signifikan sebesar 5%, apabila r hitung $>$ r tabel maka item-item pernyataan pada kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan dianggap valid. Sedangkan apabila r hitung $<$ r tabel maka

item-item pernyataan yang ada pada kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan tidak valid (Siregar, 2010).

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas diukur dengan uji statistika Cronbach's Alpha (α) jika nilai alpha lebih dari 0,6 maka dikatakan reliabel, sedangkan apabila nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dikatakan tidak reliabel.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (X). Uji multikolinearitas ini adalah salah satu model regresi linear berganda, dimana model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan korelasi antara variabel-variabel bebasnya. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance $< 0,1$ dan nilai Variance Inflation (VIF) ≥ 10 , artinya variabel mengalami multikolinearitas (Ghozali, 2013).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sama atau tidaknya variance dan residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji Glesjer dengan syarat pengambilan keputusan adalah nilai signifikansi dari variabel independen $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang akan digunakan dalam peneliti keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang menguji beda antara data yang ingin diuji normalitasnya dengan data normal baku jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka menunjukkan data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

3.8.3 Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran variabel-variabel secara singkat dalam bentuk tabel

dengan penjelasan singkat. Analisis ini meliputi jumlah penelitian, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.8.4 Uji Hipotesis

a. Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (Pencegahan *Fraud*)

A = Konstanta persamaan regresi

b_1 b_2 b_3 = nilai koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen. Apabila (+) maka mengalami kenaikan dan apabila (-) mengalami penurunan.

X_1 = Moralitas

X_2 = Religiusitas

X_3 = Sistem pengendalian internal

X_4 = *Whistleblowing system*

e = tingkat kesalahan (error)

b. Uji signifikansi secara partial (uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) secara partial (masing-masing) terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengujian untuk uji t yaitu hipotesis diterima apabila nilai signifikansi (sig) < probabilitas 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{table}$ yang berarti ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi (sig) > probabilitas 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{table}$ yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

c. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai koefisien determinasi semakin besar maka pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) semakin besar, begitu pun sebaliknya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Tempat dan waktu penelitian

Populasi dalam penelitian ini perangkat desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Situbondo. Sampel yang diambil oleh peneliti terdiri dari 5 kecamatan yang berada di kabupaten situbondo yaitu, kecamatan Mangaran, Kecamatan Kapongan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus. Penyebaran kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 17 November 2023 dan penutupan penerimaan kuesioner pada tanggal 13 Desember 2023. Pengisian kuesioner dilaksanakan *offline* dengan datang ke tempat secara langsung. Dari penyebaran yang dilakukan di 5 kecamatan yang disebar sebanyak 252 kuesioner, adapun yang kembali dengan diisi lengkap berjumlah 80 kuesioner.

b. Karakteristik responden

Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa di 5 kecamatan kabupaten Situbondo. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, jabatan, pendidikan terakhir, lama bekerja, usia dan pendapatan. Berikut adalah perincian karakteristik responden berdasarkan pengelompokan di atas.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	64	80%
Perempuan	16	20%
Total	80	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 yang merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki mendominasi dengan persentase 80% berjumlah 64 orang. Sedangkan sisanya merupakan jenis kelamin perempuan dengan persentase 20% berjumlah 16 orang.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kepala Desa	9	11%
Sekretaris Desa	11	14%
Bendahara Desa	10	13%
KAUR	24	30%
KASIE	11	14%
Staf	15	19%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 yang merupakan tabel frekuensi jabatan responden, dapat dilihat bahwa bagian kepala urusan (KAUR) mendominasi dengan persentase 30% berjumlah 24 orang. Adapun urutan kedua yaitu bagian staf sebanyak 19% berjumlah 15 orang, disusul dengan sekretaris desa dan KASIE dengan persentase 14% berjumlah 11 orang, lalu dilanjutkan dengan

bendahara desa sebanyak 10 orang dengan persentase 10% dan yang terakhir yaitu kepala desa dengan persentase 11% berjumlah 9 orang.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/Sederajat	51	64%
Diploma (D3) / Sarjana (S1)	23	29%
Magister (S2)	5	6%
Doktor (S3)	1	1%
Total	80	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 yang merupakan tabel frekuensi pendidikan terakhir responden, dapat dilihat bahwa tingkat SMA/ sederajat mendominasi dengan persentase 64% berjumlah 51 orang. Adapun urutan kedua yaitu bagian tingkat Diploma (D3) / Sarjana (S1) sebanyak 29% berjumlah 23 orang. Selanjutnya pada tingkat Magister (S2) menjadi urutan ketiga dengan persentase 6% berjumlah 5 orang dan yang terakhir yaitu berjumlah 1 orang dengan persentase 1% pendidikan terakhir tingkat doktor (S3).

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
< 1 Tahun	2	3%
1 – 5 Tahun	41	51%
6 – 10 Tahun	21	26%
11 – 15 Tahun	7	9%
16 – 20 Tahun	7	9%
> 20 Tahun	2	3%
Total	80	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 yang merupakan tabel frekuensi lama bekerja responden, dapat dilihat bahwa jumlah terbesar adalah 41 responden dengan waktu lama bekerja 1-5 tahun dengan persentase 51%, dilanjutkan dengan waktu lama bekerja 6-10 tahun berjumlah 21 responden dengan persentase 26%, urutan ketiga yaitu berjumlah 7 orang dengan waktu lama bekerja 11-15 tahun dan 16-20 tahun dengan persentase yang sama yakni 9%, dan yang terakhir ialah berjumlah 2 responden dengan persentase 3% yang waktu lama bekerjanya yaitu <1 tahun dan >20 tahun.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

Usia	Jumlah	Persentase
< 20 Tahun	0	0%
20 – 30 Tahun	31	39%
31 – 40 Tahun	23	29%
41 – 50 Tahun	20	25%
51 – 60 Tahun	6	8%
> 60 Tahun	0	0%
Total	80	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 yang merupakan tabel frekuensi usia responden, dapat dilihat bahwa responden berusia 20-30 tahun mendominasi dengan persentase 39% berjumlah 31 responden, lalu dilanjutkan dengan respon berusia 31-40 tahun dengan persentase 29% berjumlah 23 responden, selanjutnya di urutan ketiga yaitu responden usia 41-50 tahun berjumlah 20 responden dengan persentase 25%, lalu dilanjutkan dengan usia yang terakhir yaitu 51-60 tahun dengan persentase 8% berjumlah 6 responden.

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.

Pendapatan	Jumlah	Persentase
< 1.000.000	0	0%
1.000.000 – 2.500.000	60	75%
2.500.001 – 5.000.000	20	25%
5.000.001 – 7.500.000	0	0%
7.500.001 – 10.000.000	0	0%
> 10.000.000	0	0%
Total	80	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 yang merupakan tabel frekuensi pendapatan responden, dapat dilihat bahwa responden dengan pendapatan 1.000.000-2.500.000 mendominasi dengan persentase 75% berjumlah 60 responden, lalu dilanjutkan dengan pendapatan 2.500.001-5.000.000 berjumlah 20 responden dengan persentase 25%.

4.1.2 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menentukan valid atau tidaknya sebuah pernyataan pada masing-masing indikator. Pada penelitian ini, uji SPSS diuji menggunakan aplikasi SPSS dengan taraf signifikan 5%. Dalam penelitian ini derajat kebebasan (Degree of freedom) adalah $df = n - 2$. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 80 responden, jadi besarnya $df = 80 - 2 = 78$ dengan alpha 0,05 (5%). Maka didapat r tabel 0,219. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas (X1)

No	Item	Taraf Kesalahan	R Tabel	Hasil		Keterangan
				Sig	R Hitung	
1	X1.1	0,05	0,219	0,00	0,495	Valid
2	X1.2	0,05	0,219	0,00	0,546	Valid
3	X1.3	0,05	0,219	0,00	0,625	Valid
4	X1.4	0,05	0,219	0,00	0,569	Valid
5	X1.5	0,05	0,219	0,00	0,465	Valid
6	X1.6	0,05	0,219	0,00	0,435	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan variabel moralitas memiliki nilai signifikansi < 0.05 dan nilai r hitung seluruhnya lebih dari r tabel yaitu 0,219. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel moralitas ini dianggap valid.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Religiusitas (X2)

No	Item	Taraf Kesalahan	R Tabel	Hasil		Keterangan
				Sig	R Hitung	
1	X2.1	0,05	0,219	0,00	0,594	Valid
2	X2.2	0,05	0,219	0,00	0,673	Valid
3	X2.3	0,05	0,219	0,00	0,505	Valid
4	X2.4	0,05	0,219	0,00	0,634	Valid
5	X2.5	0,05	0,219	0,00	0,609	Valid
6	X2.6	0,05	0,219	0,00	0,547	Valid
7	X2.7	0,05	0,219	0,00	0,587	Valid
8	X2.8	0,05	0,219	0,00	0,554	Valid
9	X2.9	0,05	0,219	0,00	0,595	Valid
10	X2.10	0,05	0,219	0,00	0,413	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi < 0.05 dan nilai r hitung seluruhnya lebih dari r tabel yaitu 0,219.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel religiusitas ini dianggap valid.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3)

No	Item	Taraf Kesalahan	R Tabel	Hasil		Keterangan
				Sig	R Hitung	
1	X3.1	0,05	0,219	0,00	0,505	Valid
2	X3.2	0,05	0,219	0,00	0,541	Valid
3	X3.3	0,05	0,219	0,00	0,481	Valid
4	X3.4	0,05	0,219	0,00	0,524	Valid
5	X3.5	0,05	0,219	0,00	0,731	Valid
6	X3.6	0,05	0,219	0,00	0,620	Valid
7	X3.7	0,05	0,219	0,00	0,587	Valid
8	X3.8	0,05	0,219	0,00	0,562	Valid
9	X3.9	0,05	0,219	0,00	0,588	Valid
10	X3.10	0,05	0,219	0,00	0,620	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi < 0.05 dan nilai r hitung seluruhnya lebih dari r tabel yaitu 0,219. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Sistem Pengendalian Internal dianggap valid.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Variabel *Whistleblowing system* (X4)

No	Item	Taraf Kesalahan	R Tabel	Hasil		Keterangan
				Sig	R Hitung	
1	X4.1	0,05	0,219	0,00	0,733	Valid
2	X4.2	0,05	0,219	0,00	0,613	Valid
3	X4.3	0,05	0,219	0,00	0,649	Valid
4	X4.4	0,05	0,219	0,00	0,540	Valid
5	X4.5	0,05	0,219	0,00	0,724	Valid
6	X4.6	0,05	0,219	0,00	0,675	Valid
7	X4.7	0,05	0,219	0,00	0,665	Valid
8	X4.8	0,05	0,219	0,00	0,523	Valid
9	X4.9	0,05	0,219	0,00	0,783	Valid
10	X4.10	0,05	0,219	0,00	0,770	Valid
11	X4.11	0,05	0,219	0,00	0,739	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan variabel *Whistleblowing system* memiliki nilai signifikansi < 0.05 dan nilai r hitung seluruhnya lebih dari r tabel yaitu 0,219. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel *Whistleblowing system* dianggap valid.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel *Fraud* (Y)

No	Item	Tarf Kesalahan	R Tabel	Hasil		Keterangan
				Sig	R Hitung	
1	Y1	0,05	0,219	0,00	0,809	Valid
2	Y2	0,05	0,219	0,00	0,859	Valid
3	Y3	0,05	0,219	0,00	0,881	Valid
4	Y4	0,05	0,219	0,00	0,833	Valid
5	Y5	0,05	0,219	0,00	0,873	Valid
6	Y6	0,05	0,219	0,00	0,725	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan variabel *Fraud* memiliki nilai signifikansi < 0.05 dan nilai r hitung seluruhnya lebih dari r tabel yaitu 0,219. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel *Fraud* dianggap valid.

b. Uji Reabilitas

Reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi dari jawaban yang diperoleh. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap suatu pernyataan dan dari waktu ke waktu cenderung stabil. Reliabilitas suatu pernyataan dapat diketahui dari nilai Cronbach Alpha, yang mana instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha $> 0,60$. Apabila nilai Cronbach Alpha $< 0,60$ maka tidak dapat dikatakan reliabel. Berikut adalah hasil uji reabilitas:

Tabel 4.12
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Critical Value	Keterangan
Moralitas	0,712	0,60	Reliabel
Religiusitas	0,712	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,775	0,60	Reliabel
<i>Whistleblowing system</i>	0,869	0,60	Reliabel
<i>Fraud</i>	0,901	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masing- masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha $>0,60$. Dengan demikian, semua variabel dikatakan reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya kemiripan dari variabel independent satu dengan yang lain. Sebuah model regresi dikatakan baik apabila tidak mengalami gejala multikolinearitas. Ada tidaknya problem multikolinearitas didalam model regresi tersebut dapat dideteksi melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Suatu model regresi dikatakan terdapat gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 25.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Moralitas	0,822	1,216
Religiusitas	0,767	1,303
Sistem Pengendalian Internal	0,686	1,458
<i>Whistleblowing System</i>	0,770	1,298

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa variabel moralitas (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,822 dan VIF 1,216. Variabel religiusitas (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,767 dan VIF 1,303. Variabel sistem pengendalian internal (X3) memiliki nilai tolerance sebesar 0,686 dan VIF 1,458. Variabel *Whistleblowing system* (X4) memiliki nilai tolerance sebesar 0,770 dan VIF sebesar 1,298. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model ini, karena seluruh nilai VIF <10 dan nilai tolerance >0,1.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sama atau tidaknya variance dan residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Persyaratan untuk mengambil keputusan menggunakan Uji Glesjer yaitu nilai signifikansi dari variabel independen >0,05. Berikut adalah hasil uji statistik uji heteroskedastisitas berdasarkan SPSS 25.

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Moralitas	0,736
Religiusitas	0,715
Sistem Pengendalian Internal	0,819
<i>Whistleblowing System</i>	0,100

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa variabel moralitas (X1) memiliki nilai signifikansi 0,736. Variabel religiusitas (X2) memiliki nilai signifikansi 0,715. Variabel sistem pengendalian internal (X3) memiliki nilai signifikansi 0,819. Variabel *Whistleblowing system* (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,1. Nilai signifikansi dari semua variabel independen $>0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode uji nilai *Kolmogrov-Smirnov*. Dimana Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka residual tidak berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.26836462
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.127
	Negative	-.113
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4.3 diatas, nilai signifikansinya ialah 0,103 yang artinya $>0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dapat dikatakan residual berdistribusi normal.

4.2.4 Uji Hipotesis

a. Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen (X) yaitu Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing system* terhadap variabel dependen (Y) yaitu Pencegahan *Fraud*.

Tabel 4.15
Hasil Regresi Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	21.109	2,883	0,005
Moralitas	-0,311	1,279	0,205
Religiusitas	0,288	1,828	0,072
Sistem Pengendalian Internal	0,149	1,149	0,254
<i>Whistleblowing System</i>	-0,170	2,036	0,045

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan gambar 4.4, analisis regresi berganda pada gambar di atas diperoleh koefisien untuk variabel moralitas (X1) adalah -0,311 dan variabel religiusitas (X2) adalah 0,288. Adapun variabel selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal diperoleh koefisien 0,149 dan untuk *Whistleblowing system* sebesar -0,170, dan konstanta sebesar 21,109 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

$$Y = 21,109 - 0,311X_1 + 0,288X_2 + 0,149X_3 - 0,170X_4$$

Model persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 21,109 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari semua variabel X maka nilai variabel kecenderungan *Fraud* (Y) adalah 21,109.
- b. Koefisien regresi variabel moralitas (X1) sebesar -0,311 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X1 akan memberikan kenaikan skor sebesar -0,311.

- c. Koefisien regresi variabel religiusitas (X2) sebesar 0,288 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X2 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,288.
- d. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X3) sebesar 0,149 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X3 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,149.
- e. Koefisien regresi variabel *Whistleblowing system* (X4) sebesar -0,170 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X4 akan memberikan kenaikan skor sebesar -0,170.

b. Uji signifikansi secara parsial (uji t)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Jika nilai signifikansinya $< 0,05$ atau $< 0,10$ dan nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka variabel independent secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya jika nilai signifikansinya $> 0,05$ atau $> 0,10$ dan nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji T:

Tabel 4.16

Hasil Uji Parsial T

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	21.109	2,883	0,005
Moralitas	-0,311	1,279	0,205
Religiusitas	0,288	1,828	0,072
Sistem Pengendalian Internal	0,149	1,149	0,254
<i>Whistleblowing System</i>	-0,170	2,036	0,045

Sumber: Data Primer yang Diolah

$$df = n-k-1 = 80-4-1 = 75 \text{ (Mencari t tabel)}$$

n = jumlah responden

k = jumlah variabel X

T tabel untuk taraf signifikansi 5% = 1,992

T tabel untuk taraf signifikansi 10% = 1.665

Berdasarkan hasil uji t pada gambar 4.5 diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- 1) Variabel moralitas memperoleh t hitung 1,279 < t tabel 1,992 dan nilai signifikasinya 0.205 lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moralitas tidak berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*.
- 2) Variabel religiusitas memperoleh t hitung 1,828 > t tabel 1,665 dan nilai signifikasinya 0.072 lebih kecil dari 0.10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*.

- 3) Variabel sistem pengendalian internal memperoleh t hitung 1,149 < t tabel 1,992 dan nilai signifikasinya 0.254 lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*.
- 4) Variabel *Whistleblowing system* memperoleh t hitung 2,036 > t tabel 1,992 dan nilai signifikasinya 0.045 lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*.

c. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinan merupakan ukuran yang menguji seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Semakin tinggi koefisien determinasi semakin tinggi juga kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model didalam menerangkan variasi variabel dependen nilai koefisien determinasi. Berikut Hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.17

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,323 ^a	0,105	0,057	3,35439

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R Square adalah 0,105. Hal itu menunjukkan bahwa variabel moralitas, religiusitas, sistem pengendalian internal dan

Whistleblowing system memiliki pengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud* sebesar 10,5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel lain yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Moralitas terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan dari pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini diketahui bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* sehingga hipotesis kedua (H_1) ditolak. Secara parsial, moralitas tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. Hal ini diperkuat dengan hasil uji t yang memperoleh t hitung $1,279 < t$ tabel $1,992$ dan nilai signifikasinya 0.205 lebih besar dari 0.05 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moralitas tidak berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Anggun (2021) moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dana bumdes di desa baloli kecamatan basamba kabupaten luwu utara. Hal ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka (2022) yang menyatakan bahwa moralitas aparat tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* di organisasi perangkat daerah provinsi riau.

Moralitas tidak berpengaruh pada pencegahan *Fraud* disebabkan karena seorang individu menganggap dirinya pada tahap moralitas yang tinggi dikehidupan sehari-hari, namun bisa saja berbuat kecurangan (*Fraud*) karena adanya tekanan dari orang lain atau keadaan. Jadi, tinggi rendahnya moralitas

tidak mempengaruhi individu akan berperilaku baik atau mencegah terjadinya *Fraud*.

4.2.2 Pengaruh Religiusitas terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan dari pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini diketahui bahwa religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Secara Parsial, religiusitas memperoleh t hitung $1,828 > t$ tabel $1,665$ dan nilai signifikasinya 0.072 lebih kecil dari 0.10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*. Hal tersebut berarti bahwa tingkat religiusitas individual selaras dengan tingkat pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan desa di kabupaten Situbondo. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan tindakan kecurangan atau *Fraud*.

Adanya pengaruh religiusitas terhadap pencegahan fraud menandakan bahwa perangkat desa di Kabupaten Situbondo begitu memperhatikan kualitas keimanan secara individual dalam dunia kerja. Semakin mereka yakin terhadap keimanan mereka maka semakin besar pula potensi pengaruhnya terhadap tindakan pencegahan tindakan fraud atau kecurangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abi (2020) yang menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara religiusitas, pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap pencegahan *Fraud*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Amalia (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *Fraud*.

4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan

Fraud

Berdasarkan dari pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini diketahui bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* sehingga hipotesis kedua (H_3) ditolak. Secara parsial, sistem pengendalian internal memperoleh t hitung $1,149 < t$ tabel $1,992$ dan nilai signifikasinya 0.254 lebih besar dari 0.05 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tuti (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam pencegahan *Fraud* pada RSUD Aceh Timur. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal tidak dapat menekan terjadinya pencegahan kecurangan (*Fraud*). Penelitian yang dilakukan oleh Ridho (2019) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* PT. Inalum.

Tidak terpengaruhnya sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* bertentangan dengan hipotesis yang peneliti nyatakan sebelumnya. Dalam suatu pemerintahan sistem pengendalian internal dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor

manusia baik itu disengaja maupun tidak, akan dapat ditekan sekecil mungkin. Sistem pengendalian internal ini tidak hanya menyangkut masalah penelahan atas catatan tetapi juga meliputi penilaian atas berbagai fungsi operasional dalam suatu pemerintahan. Untuk itu diperlukan sebuah sistem pengendalian internal yang membantu pihak perangkat desa untuk mengendalikan pemerintahannya.

4.2.3 Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan dari pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini diketahui bahwa *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* sehingga hipotesis kedua (H_4) diterima. Secara persial, *Whistleblowing system* memperoleh nilai t hitung $2,036 > t$ tabel $1,992$ dan nilai signifikasinya 0.045 lebih kecil dari 0.05 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ririn (2022) serta Komang (2019) yang menghasilkan suatu simpulan yang sama yakni variabel *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*.

Whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin efektif penggunaan *Whistleblowing system* maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik. Keberadaan sistem ini, memberikan efek takut kepada setiap pegawai untuk melakukan kecurangan karena pada saat melakukan kegiatan satu sama lain telah melakukan pengawasan. Semakin

banyak pengawasan yang terjadi maka pengaruhnya akan semakin besar pula terhadap tindakan pencegahan fraud atau kecurangan. Hal inilah yang dapat menyokong proses pencegahan suatu tindakan *Fraud* yang akan terjadi pada perangkat desa pengelola keuangan di Kabupaten Situbondo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai pengaruh Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa, dapat disimpulkan hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas, tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan desa di kabupaten Situbondo. Jadi, tinggi rendahnya moralitas tidak mempengaruhi individu akan berperilaku baik atau mencegah terjadinya *Fraud*.
2. Religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan desa di kabupaten Situbondo. Tingginya tingkat religiusitas seseorang dapat mempengaruhi pegawai desa untuk melakukan tindakan pencegahan *Fraud*.
3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan desa di kabupaten Situbondo. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal tidak dapat menekan terjadinya pencegahan kecurangan (*Fraud*).
4. *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan desa di kabupaten Situbondo. Penelitian ini membuktikan bahwa pegawai lebih takut jika terdapat pengawasan antara

yang satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan dapat mencegah suatu tindakan *Fraud* yang akan terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa, maka saran dari peneliti ialah sebagai berikut

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pembaharuan dengan menambahkan variabel penelitian dan juga menggunakan *software* statistik yang berbeda.
2. Jika tujuan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih mengerucut maka disarankan untuk melakukan penelitian pada satu tempat penelitian saja dengan mempertimbangkan pengimplementasian *Whistleblowing system* pada pemerintahan terkait.
3. Untuk kualitas dan hasil data yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan instrumen penelitian tidak hanya dalam bentuk kuesioner, tetapi juga dalam bentuk wawancara ataupun survey kepada pihak-pihak yang terkait.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti

2. Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan pada kuesioner dan juga kejujuran dalam mengisi kuisisioner sehingga ada kemungkinan hasilnya kurang akurat.
3. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai pencegahan *Fraud* dengan metode penelitian yang berbeda, sampel yang lebih luas, dan penggunaan instrumen penelitian yang berbeda dan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Rahman Haji, "Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran". Malaysia: Gema Insani Press, 1997.
- Adelin, Vani & Eka Fauzihardani. (2013). Pengaruh "Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Etis". WRA, Vol. 1, No.2.
- Agnes. 2023. "Pengaruh Tingkat Religiusitas Dan Pengetahuan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Kecenderungan Fraud (Kecurangan) Pedagang Di Pasar Tradisional Tahunan Jepara". Skripsi. Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Alam, Muhammad Dimar. "Persepsi Aparatur Pemerintahan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap *Fraud* dan Peran *Whistleblowing* sebagai Upaya Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*".
- Anandya, Komang Candra Restalini dan Desak Nyoman Sri Werastuti. (2020). "Pengaruh *Whistleblowing system*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 10, No.2.
- Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2008). Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi. (Alih bahasa: Herman Wibowo). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bagustianto, Rizki dan Nurkholis. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Studi pada PNS BPK RI)". Malang: e-journal Universitas Brawijaya 2015.
- Benardin, Deden Edwar Yokeu dan Imas Solihat. (2019). "Internal *Whistleblowing* sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas sebagai Pemoderasi". Jurnal Sain Manajemen, Vol. 1, No. 1.
- F, Atar Satria dkk. (2021). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Variabel Moderating". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi, Vol. 6, No.4.

- Fikar, Muhammad. (2013). “Analisis Dampak *Whistleblowing system* pada Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus pada PT. Pertamina Persero)”. Skripsi. Universitas Gajah Mada.
- KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblowing system* – WBS). Jakarta: KNKG.
- Katarina. 2021. “Pengaruh *Whistleblowing System* Dan Perilaku Etis Terhadap Pencegahan Fraud”. Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Libramawan, Irvandy Pratana. (2014). “Pengaruh Penerapan *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan Kecurangan”. Skripsi. Universitas Widyatama LPSK. (2011). Memahami Whistleblower. Jakarta: LPSK
- Mahdi, Suriana AR dan Herman Darwis. (2020). “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. 6, No. 2.
- Nugroho, Vredi Octaviari. (2015). “Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Perilaku Etis sebagai Variabel Intervening pada PT. Pagilaran”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prayogi, Wahyu Refky dan Dwi Suprajitno. (2020). “Pengaruh Komitmen Profesional, Personal Cost, dan Moral Reasoning terhadap Niat Seseorang untuk Melakukan Tindakan *Whistleblowing*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol.2 No.1
- Puspasari, Novita dan Eko Suwardi. 2012. Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Gajah Mada.
- Rahadian Malik M. G. (2010). “Analisis Perbedaan Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif Mahasiswa PPA dan Non-PPA pada Hubungannya dengan *Whistleblowing*”. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Rahmadani, Arisna. (2018). “Pengaruh Orientasi Etika Relativisme, Intensitas Moral, Komitmen Organisasi, Sifat Machiavellian dan Tingkat Keseriusan

- Kecurangan terhadap Intensi untuk Melakukan *Whistleblowing* Internal (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)". JOM FEB, Vol. 1, No.1.
- Rodiyah, Syaifa. (2015). "Pengaruh Sifat Machiavellian, Lingkungan Etika dan Personal Cost terhadap Intensi Melakukan *Whistleblowing system*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Siregar, Anita dan Ayu Syahbana Surbakti. (2019). "Analisis Pengaruh *Whistleblowing system* dan Rapat Komite Audit terhadap Jumlah Kecurangan". Jurnal Akuntansi, Auditing, dan Keuangan, Vol.16, No. 1.
- Sudarma, Komang Agus dkk. (2019). "Pengaruh Persepsi Karyawan mengenai Budaya Kejujuran dan *Whistleblowing system* dalam Pencegahan *Fraud* pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan". JIMAT, Vol. 10, No. 3.
- Suyatmiko, Wawan Heru. (2021). "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020". Jurnal Antikorupsi, Vol. 7, No. 1.
- Suzila. (2018). "Pengaruh Sifat Machiavellian dan Lingkungan Etika terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing* (Studi Eksperimentasi pada SKPD diLubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman)". Universitas Negeri Padang
- Wakhidah, Anisa Kiromil dan Kurniawati Mutmainah. (2021). "Bystander Effect, *Whistleblowing system*, Internal Locus of Control, dan Kompetensi Aparatur dalam Pencegahan *Fraud* Dana Desa". JEBE, Vol. 3, No. 1.
- Wakefield, Robin. L. "Accounting and Machiavellianism". Behavioral research in Accounting, Volume 20, Number 1, pp. 115-129, 2008.
- Widya, 2021. "Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecurangan karyawan". Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Wilopo, 2006. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9.Padang, 23 – 26 Agustus 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Perangkat Desa kabupaten Situbondo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa” bersama dengan kuesioner ini saya Moh. Khairil Anwar dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktunya mengisi seluruh pertanyaan yang ada pada kuesioner ini. Dimohon untuk membaca petunjuk pengisian kuesioner dan menjawab sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Adapun informasi yang terkumpul melalui kuesioner ini hanya akan digunakan untuk penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penilaian.

IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada tempat yang telah disediakan.

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Lama Bekerja :
5. Jabatan :
6. Pendidikan :

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Berilah tanda centang (√) pada pernyataan berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Terdapat lima (5) pilihan jawaban yang ada pada setiap pernyataan, yaitu:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Lampiran Kuesioner Penelitian (lanjutan)

1. Moralitas

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<i>Pre-conventional</i>						
1	Saya melakukan perbuatan atau ucapan yang baik dalam berinteraksi dengan sesama pegawai.					
2	Saya melakukan perbuatan baik terhadap orang lain walaupun orang lain berbuat tidak baik terhadap saya.					
<i>Conventional</i>						
3	Saya melakukan perbuatan baik terhadap orang lain bukan hanya supaya dipandang baik oleh orang di sekitar saya.					
4	Saya mematuhi aturan yang ada pada pemerintahan desa karena takut terkena sanksi.					
<i>Post-conventional</i>						
5	Saya menaati peraturan yang ada agar tidak merugikan desa					
6	Saya melakukan perbuatan baik sesuai dengan etika serta hati nurani.					

2. Religiusitas

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
Dimensi keyakinan						
1	Saya percaya bahwa Allah itu ada					
2	Saya yakin bahwa Allah selalu					

	memberikan jalan yang terbaik untuk saya					
Dimensi praktik agama						
3	Saya menjalankan ajaran agama islam seperti sholat lima waktu					
4	Saya melaksanakan puasa di bulan Ramadhan					
Dimensi pengalaman						
5	Saya selalu berusaha mengingat Allah dalam segala situasi					
6	Saya tetap yakin terhadap ajaran agama meskipun diluar nalar					
Dimensi pengetahuan agama						
7	Saya mengerti hukum agama islam yang halal dan haram					
8	Memahami ajaran agama merupakan hal yang penting bagi saya					
Dimensi pengamalan agama						
9	Saya melakukan perbuatan baik sesuai dengan etika serta hati nurani.					
10	Saya yakin bahwa Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk saya					

3. Sistem Pengendalian Internal

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
Pemisahan tanggung jawab fungsional						
1	Pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas					

2	Pemerintah desa memiliki pemisahan tugas dan tanggungjawab yang baik					
3	Pemerintah desa memiliki sistem pembagian wewenang untuk otorisasi atas transaksi yang terjadi					
Sistem wewenang dan prosedur pencatatan						
4	Pemerintah desa mempunyai prosedur pencatatan yang jelas atas transaksi yang terjadi					
5	Pemerintah menggunakan formulir bernomor urut tercetak dalam transaksi keluar masuknya dana					
Pelaksanaan tugas dan fungsi						
6	Pemerintah desa seringkali mengadakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan operasional desa					
7	Pemerintah desa melakukan pencocokan fisik barang dengan catatannya secara rutin					
8	Pemerintah desa menetapkan kebijakan pengambilan cuti bagi pegawai					
Mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawab						
9	Pemerintah desa melakukan seleksi terhadap calon pegawai					
10	Perusahaan mengadakan pelatihan pegawai secara rutin untuk mengembangkan keahlian pegawai					

4. Whistleblowing system

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
Aspek Struktural						
1	Saya tidak takut untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi karena ada kebijakan mengenai perlindungan pelapor/ <i>whistleblower</i> dalam <i>Whistleblowing</i>					
2	Saya bersedia menyatakan komitmen untuk melaksanakan <i>Whistleblowing system</i> dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan					
3	Perusahaan memiliki media komunikasi sebagai fasilitas pelaporan pelanggaran					
Aspek Operasional						
4	Saya akan menggunakan nama samaran/anonim jika melaporkan suatu pelanggaran/kecurangan					
5	Saya berani melaporkan tindakan pelanggaran karena ada kekebalan atas sanksi administratif					
6	Saya setuju para kepala bagian khususnya bagian keuangan ikut terlibat dalam penerapan <i>Whistleblowing system</i>					
7	Saya lebih muda dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi karena tersedianya wada khusus untuk melaporkan pelanggaran					

8	Laporan pelanggaran yang saya laporkan harus dilakukan investigasi lebih lanjut					
9	Perusahaan media komunikasi sebagai fasilitas pelaporan pelanggaran					
Aspek Perawatan						
10	Evaluasi dan perbaikan harus senantiasa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas <i>Whistleblowing system</i>					
11	Perusahaan harus melakukan komunikasi secara berkala dengan karyawan mengenai hasil dari penerapan <i>Whistleblowing system</i>					

5. Pencegahan *Fraud*

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
Korupsi						
1	Saya dapat memanfaatkan jabatan saya dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih dari organisasi lain diluar pemerintah desa					
2	Saya akan melakukan apapun untuk menambah keuntungan pribadi, walaupun dengan melakukan korupsi					
Penyalahgunaan Aset						
3	Saya akan mengambil dan menggunakan uang kas desa untuk kebutuhan pribadi saya					

4	Dalam mencatat transaksi keuangan, saya dapat mengubah tanggal transaksi tersebut lebih awal dari waktu yang sebenarnya					
Pelaporan Keuangan yang Menyesatkan						
5	Dalam menyusun laporan keuangan, saya diminta untuk merekayasa laporan keuangan desa dengan mengabaikan prinsip penyusunan laporan keuangan yang berlaku					
6	Saya dapat menciptakan dan mencatat pendapatan desa yang sebenarnya tidak terjadi, agar pendapatan desa terlihat meningkat.					

Berikut adalah lampiran dokumentasi penyebaran kuesioner:





Hasil Uji Statistik

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21.109	7.320		2.883	.005		
	Moralitas	-.311	.243	-.154	-1.279	.205	.822	1.216
	Religiusitas	.288	.157	.228	1.828	.072	.767	1.303
	Sistem Pengendalian Internal	.149	.129	.152	1.149	.254	.686	1.458
	Whistleblowing System	-.170	.084	-.253	-2.036	.045	.770	1.298

a. Dependent Variable: Fraud

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.784	4.821		-.785	.435		
	Moralitas	.054	.160	.042	.339	.736	.822	1.216
	Religiusitas	.038	.104	.047	.367	.715	.767	1.303
	Sistem Pengendalian Internal	-.020	.085	-.031	-.229	.819	.686	1.458
	Whistleblowing System	.092	.055	.213	1.664	.100	.770	1.298

a. Dependent Variable: RES2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.26836462
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.127
	Negative	-.113
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.109	7.320		2.883	.005
	Moralitas	-.311	.243	-.154	-1.279	.205
	Religiusitas	.288	.157	.228	1.828	.072
	Sistem Pengendalian Internal	.149	.129	.152	1.149	.254
	Whistleblowing System	-.170	.084	-.253	-2.036	.045

a. Dependent Variable: Fraud



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 18520023
Nama : MOH. KHAIRIL ANWAR
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
Judul Skripsi : **"PENGARUH MORALITAS, RELIGIUSITAS, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA"**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	20 Mei 2022	Pengajuan outline	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
2	23 Mei 2022	Penggantian judul proposal	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
3	31 Mei 2022	Review jurnal	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
4	5 Oktober 2023	Pengajuan BAB I	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	17 Oktober 2023	Pengajuan BAB II & III	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	18 Oktober 2023	ACC Proposal skripsi	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	9 November 2023	Revisi Proposal Skripsi	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	10 November 2023	Konsultasi Kuesioner	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	18 Desember 2023	Pengajuan Skripsi	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 18 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Novi Lailiyul Wafiroh, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
 NIP : 197612102009122001
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : MOH. KHAIRIL ANWAR
 NIM : 18520023
 Konsentrasi : Auditing

Judul Skripsi : **"PENGARUH MORALITAS, RELIGIUSITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DESA"**
 (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	26%	11%	22%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Desember 2023

UP2M



Zuraidah, M.S.A

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Moh. Khairil Anwar
Tempat / Tanggal Lahir : Situbondo, 21 November 2000
Alamat Asal : Jl. Kayumas Desa Kedungdowo Kec. Arjasa Kab. Situbondo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor HP : 082233273351
Email : mohkhairil21@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2007 - 2012 : SDN 2 KEDUNGOWO
2012 - 2015 : SMPN 1 ARJASA
2015 - 2018 : SMA NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

PENDIDIKAN NON FORMAL

2018 - 2019 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Malang
2018 - 2019 : Kelas PPBA (Program Pembelajaran Bahasa Arab)
2019 - 2020 : Kelas PPBI (Program Pembelajaran Bahasa Inggris)

KEORGANISASIAN

2019 - 2022 : Musyrif Pusat Mahad Al-Jamiah UIN Malang
2020 - 2022 : Kepala Biro Design Grafis GenBI Malang
2021 - 2022 : Ketua UPKM El-Ma'rifah MSAA UIN Malang